

Majalah Digital Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur



# ASPIRASI *kita*

Edisi 17

## *Monthly Report*

### **Fraksi PKS DPRD JATIM**

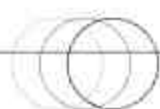
Jejak Pengabdian Fraksi PKS  
DPRD Provinsi Jawa Timur

MEI 2026

   fraksipksjatim  
 [www.fraksipksjatim.id](http://www.fraksipksjatim.id)

# ***Daftar Isi***

<b>Sampul Halaman .....</b>	<b>1</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>2</b>
<b>Profil Singkat Dewan .....</b>	<b>3</b>
<b>Ringkasan Kinerja Fraksi .....</b>	<b>4 - 27</b>
<b>Kiprah Dewan .....</b>	<b>28 - 49</b>
<b>Galeri Foto Kegiatan .....</b>	<b>50 - 54</b>
<b>Penutup .....</b>	<b>55</b>





# PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2029



**DR. AGUS CAHYONO SHI, MHI**

WAKIL KETUA KOMISI A DPRD  
JATIM, ANGGOTA FRAKSI PKS



**DR. H. PUGUH WIJI PAMUNGKAS, MM**

ANGGOTA KOMISI E DPRD JATIM,  
SEKRETARIS FRAKSI PKS



**HJ. LILIK HENDARWATI, S.AK**

ANGGOTA KOMISI C DPRD JATIM,  
KETUA FRAKSI PKS



**DRS. H.M. KHUSNUL KHULUK**

ANGGOTA KOMISI E DPRD JATIM,  
ANGGOTA FRAKSI PKS

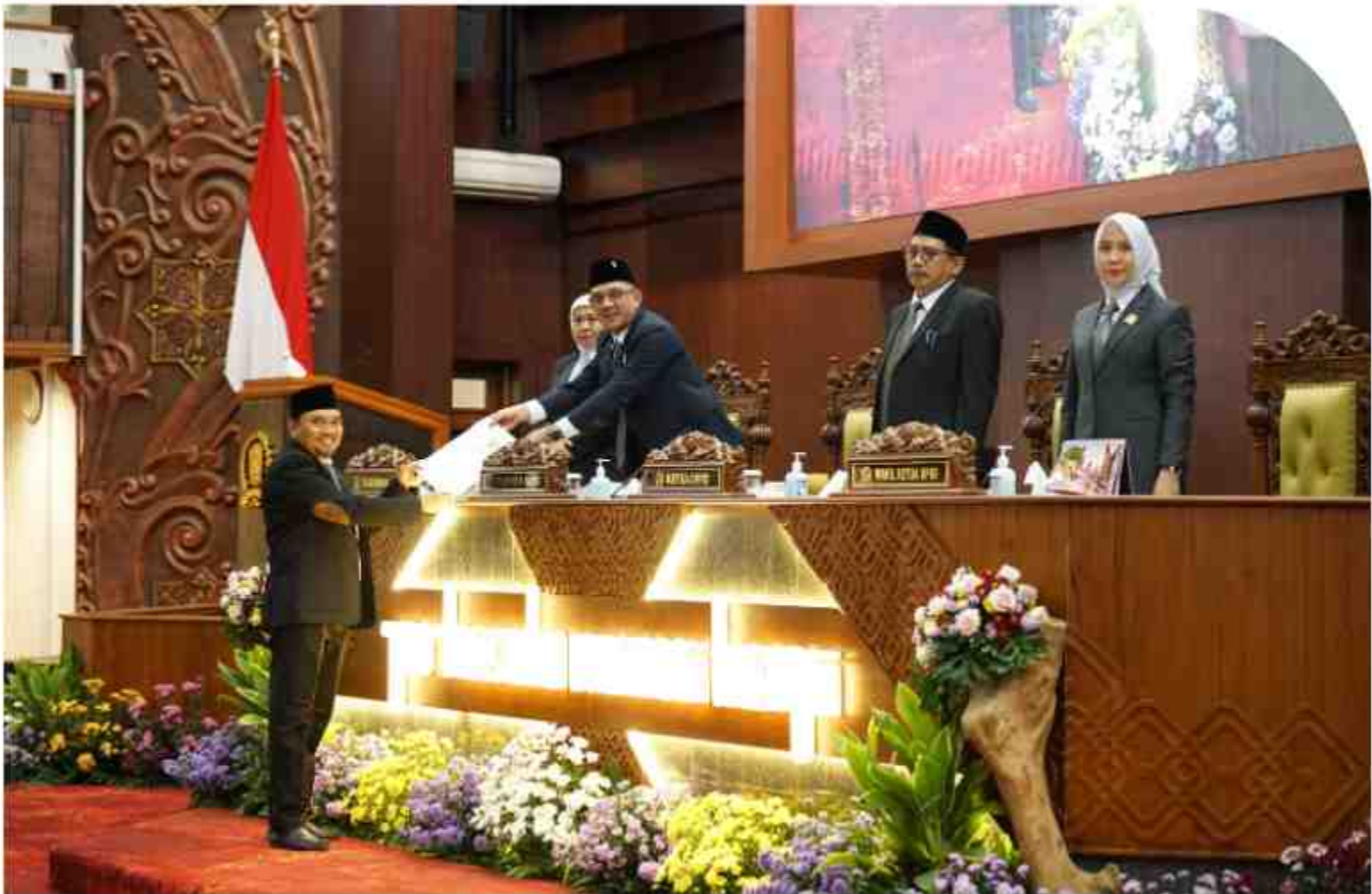


**HARISANDI SAVARI, S.PT., S.T**

ANGGOTA KOMISI D DPRD JATIM,  
BENDAHARA FRAKSI PKS

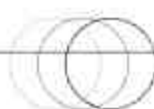
## **Agenda Rapat Paripurna**

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Mei 2026:



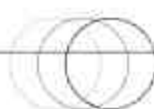
Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur  
Selasa, 5 Mei 2026

- Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pansus atas Kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur
- Pengambilan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD atas Kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur
- Penyampaian Penjelasan Pengusul atas Rancangan Perda tentang Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.



## **Agenda Rapat Paripurna**

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur  
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



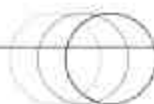
## **Agenda Rapat Paripurna**

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Mei 2026:



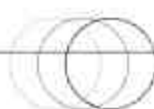
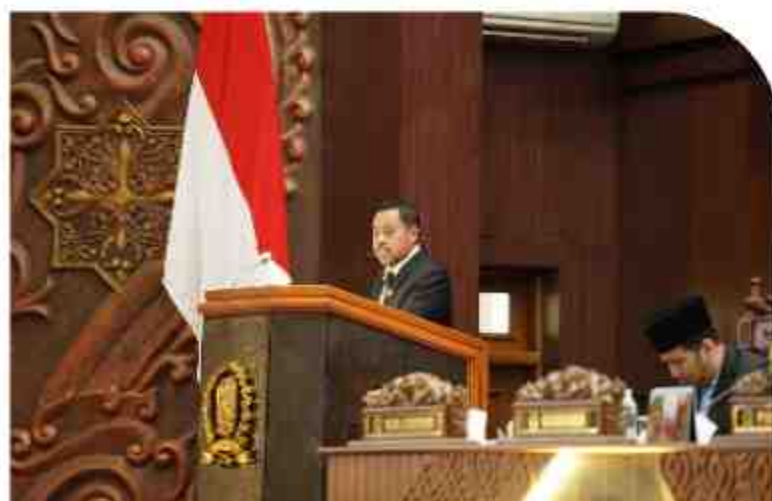
Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur  
Senin, 11 Mei 2026

- Laporan/Rekomendasi Pansus atas Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025
- Pendapat Akhir Fraksi atas 2 (dua) Rancangan Perda
- Pengambilan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas 2 (dua) Rancangan Perda
- Pendapat Akhir Gubernur atas 2 (dua) Rancangan Perda
- Persetujuan Bersama antara DPRD dan Gubernur atas 2 (dua) Rancangan Perda
- Rapat Paripurna Intern, Penyampaian Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya atas Rancangan Perda tentang Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas



## **Agenda Rapat Paripurna**

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur  
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



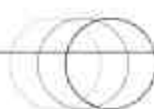
## **Agenda Rapat Paripurna**

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Mei 2026:



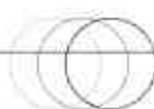
Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur  
Rabu, 13 Mei 2026

- Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025
- Pengambilan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025



## **Agenda Rapat Paripurna**

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur  
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



## **Recap 1 - 7 Mei 2026**

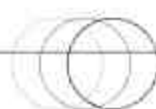
Agenda Komisi dan Badan

Dalam rangka pembahasan pajak kendaraan listrik dan opsen pajak MLBL di Jawa Timur. Komisi C menggelar rapat kerja bersama BAPENDA Jawa Timur dan PT. BPR cabang Pasuruan.



Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar forum strategis guna membahas peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat bersama dinas kesehatan, dinas sosial, dan biro kesejahteraan rakyat Jawa Timur di RSUD Sumber Glagah 04 Mei 2026

BAPEMPERDA menggelar audiensi bersama DPRD dengan Komisi A dan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur guna membahas usulan perda tentang angkutan umum berbasis online. Selasa 5 Mei 2026.



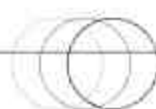


Pansus LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 melakukan forum diskusi bersama BAPPEDA dan Setwan Jawa Timur di ruang banggar 5 mei 2026

Komisi D menggelar monitoring pelaksanaan perbaikan jalan dan jembatan di UPT. PJJ DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Mojokerto 6 Mei 2026



Dalam rangka pengembangan sumber daya wisata dan ekonomi kreatif. Komisi B melakukan diskusi strategis bersama DPRD DIY dan Dinas Pariwisata DIY 6-7 Mei 2026

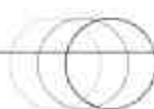




Komisi E melakukan penguatan literasi terkait inventarisasi masalah dan praktik baik dalam perlindungan penyandang disabilitas melalui pertemuan bersama Difagana Dinsos DIY (Kamis 7 MEI)



Pansus LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 melaksanakan monitoring program kegiatan BUMD bersama PT.Jatim Graha Utama, PT. Bank Jatim, PT. Pancawira Usaha, PT. Petrogas Jatim Utama, PT.BPR Jatim (Bank UMKM), PT. Air Bersih (PERSERODA), dan PT.JAMKRIDA 7-9 Mei 2026



## **Recap 8 - 14 Mei 2026**

Agenda Komisi dan Badan



Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Menggelar pertemuan strategis terkait upaya perlindungan petani tembakau terhadap rencana pemerintah membatasi kadar nikotin tanaman tembakau dan dampak bagi industri rokok dengan UPT. Perlindungan Konsumen Kediri Selasa, 12 Mei 2026



Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan sistem ramah disabilitas dalam rangka perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas melalui pertemuan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

## **Recap 14 -21 Mei 2026**

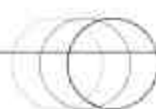
Agenda Komisi dan Badan

Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Menggelar pertemuan strategis terkait upaya perlindungan petani tembakau terhadap rencana pemerintah membatasi kadar nikotin tanaman tembakau dan dampak bagi industri rokok dengan UPT. Perlindungan Konsumen Kediri Selasa, 12 Mei 2026



Bamus DPRD Provinsi Jatim Timur menggelar pertemuan strategis bersama DPRD dan BPKAD Provinsi Kalimantan guna membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah Bamus DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar pertemuan strategis bersama DPRD dan BPKAD Provinsi Jawa Barat. Rabu, 20 Mei 2026

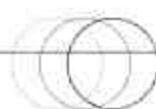




Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah Bamus DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar pertemuan strategis bersama DPRD dan BPKAD Provinsi Jawa Barat. Rabu, 20 Mei 2026



Bamus DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar koordinasi bersama DPRD dan BPKAD Provinsi Bali guna membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selasa, 19 Mei 2026

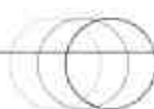




Komisi A DPRD Jatim menerima audiensi singai watch untuk membahas kondisi sungai dan pengelolaan sampah plastik serta mendorong kolaborasi lingkungan



Pansus BUMD DPRD JATIM mengevaluasi kinerja bersama bank jatim, bank UMKM, dan Jamkrida di malang . Guna memperkuat pengawasan BUMD



## **Recap 24 - 30 Mei 2026**

Agenda Komisi dan Badan

Pansus LKPJ DPRD JATIM berdiskusi dengan kementerian lingkungan hidup atau badan pengendalian lingkungan hidup pada 22-25 april 2026.

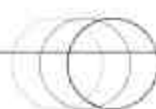
Untuk membahas peningkatan kualitas lingkungan hidup serta dampak perubahan metode perhitungan IKLH terhadap pembangunan daerah.



Bangkar DPRD JATIM melakukan forum diskusi ke biro pemerintahan setda DKI dan anjungan Jawa Timur TMII di Jakarta. Membahas perencanaan pembangunan dan anggaran, promosi seni budaya, serta kontribusi terhadap PAD.

Pansus LKPJ Gubernur Jatim memantau UPT.Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur. WS berantas dan cabang dinas pendidikan di kediri.

Terkait pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 .

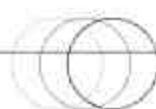




Banggar DPRD JATIM menggelar pertemuan dengan DPRD dan biro pemerintahan SETDA Provinsi Bali di Denpasar. Untuk evaluasi program serta perencanaan pembangunan dan anggaran terkait LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025.



Komisi A sidak ke kawasan pandugo Surabaya menindaklanjuti keluhan akses jalan berbahaya mendesak pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim menghentikan ego sektoral penyempitan jalan di lokasi telah menyebabkan kecelakaan fatal dengan 3 korban tewas dan 5 luka-luka



## **PKS JATIM SETUJUI DUA RAPERDA STRATEGIS, SOROTI REFORMASI BIROKRASI DAN PENGUATAN PETROGAS JATIM UTAMA**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (11/5/2026). Dua Raperda tersebut yakni perubahan kelima atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta perubahan bentuk hukum PT Petrogas Jatim Utama menjadi Perseroda.

Pendapat akhir Fraksi PKS disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Raden Harisandi Savari di hadapan sidang paripurna DPRD Jatim. Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS menegaskan bahwa perubahan regulasi perangkat daerah harus menjadi momentum pembenahan birokrasi agar lebih produktif, profesional, dan berintegritas.

“Fraksi PKS pada prinsipnya dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan susunan perangkat daerah dan perubahan bentuk hukum PT Petrogas Jatim Utama menjadi Perseroda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Harisandi.



Terkait perubahan susunan perangkat daerah, Fraksi menyoroti pentingnya kepastian hukum pasca penghapusan rincian nomenklatur asisten dan biro di lingkungan Sekretariat Daerah. FPKS meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar teknis agar tidak terjadi kekosongan pengaturan birokrasi. Selain itu, Fraksi PKS juga memberikan perhatian serius terhadap penguatan sektor ekonomi kreatif di Jawa Timur.

FPKS mendukung perubahan nomenklatur menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, namun meminta pemerintah daerah menyiapkan roadmap jangka menengah menuju pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif yang mandiri. "Ekonomi kreatif jangan hanya menjadi embel-embel nomenklatur, tetapi harus benar-benar terstruktur dan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah," tegas Harisandi.

FPKS juga mendesak percepatan pembahasan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai payung hukum yang lebih komprehensif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Sementara itu, dalam pembahasan perubahan bentuk hukum PT Petrogas Jatim Utama menjadi Perseroda, Fraksi PKS menilai langkah tersebut bukan sekadar perubahan administratif, tetapi harus menjadi momentum reformasi tata kelola BUMD sektor energi di Jawa Timur.

Menurut FPKS, Perseroda Petrogas Jatim Utama harus dikelola dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), profesional, transparan, dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen sektor migas. "Perubahan bentuk hukum ini harus menjadi titik tolak perbaikan tata kelola BUMD yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, bukan sekadar perubahan papan nama," kata Harisandi.

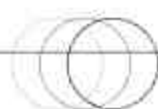
FPKS juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun roadmap pemenuhan modal dasar Perseroda secara realistis dan tidak membebani APBD. Selain itu, DPRD diminta tetap diperkuat dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja Perseroda, termasuk kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi PKS berharap ke depan PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda) mampu menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. "BUMD energi harus mampu menjadi kekuatan ekonomi daerah sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kesejahteraan rakyat Jawa Timur," pungkasnya.



**BUMD energi harus mampu menjadi kekuatan ekonomi daerah sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kesejahteraan rakyat Jawa Timur, kata Harisandi.**



## Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



## **FRAKSI PKS JATIM BERI CATATAN KRITIS ATAS LKPJ 2025, DARI BUMD HINGGA KEMISKINAN**

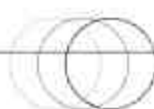


Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Catatan tersebut mulai dari persoalan optimalisasi aset daerah, kinerja BUMD, serapan anggaran, hingga penanganan kemiskinan dan pengangguran.

Pendapat akhir Fraksi PKS itu disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati dalam sidang paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (13/5/2026). Dalam pandangannya, Fraksi PKS menyoroti masih banyaknya aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, baik yang berada di bawah pengelolaan OPD maupun BUMD. Kondisi tersebut dinilai membuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergarap maksimal.

“Fraksi PKS mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan audit dan pemetaan aset secara menyeluruh agar aset daerah tidak menganggur tanpa rencana pemanfaatan yang jelas,” ujar Lilik. Fraksi PKS juga meminta pemerintah melakukan monetisasi aset idle melalui skema kerja sama strategis agar aset yang selama ini tidak produktif dapat menjadi sumber PAD baru bagi daerah. Selain itu, Fraksi PKS menilai kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD masih stagnan dan belum optimal. Sejumlah BUMD dinilai belum mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun instrumen intervensi pemerintah di sektor strategis.

Karena itu, PKS mendorong penguatan tata kelola BUMD melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), penetapan indikator kinerja yang jelas, serta evaluasi direksi dan komisaris secara berkala berbasis capaian kinerja. “Transparansi data kinerja BUMD juga harus dibuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.



Fraksi PKS juga menyoroti rendahnya serapan anggaran daerah tahun 2025 yang hanya mencapai 93,82 persen atau Rp31,204 triliun dari total pagu Rp33,256 triliun. Rendahnya penyerapan itu menyebabkan SiLPA masih cukup besar. Beberapa OPD bahkan tercatat memiliki sisa anggaran tinggi, seperti Dinas Pendidikan sebesar Rp190 miliar dan Dinas Kesehatan Rp149 miliar. Sementara Belanja Tidak Terduga (BTT) hanya terserap 39,97 persen.

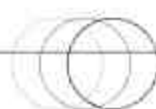
Menurut FPKS, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius di tengah tingginya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Timur. "Fraksi PKS merekomendasikan pemerintah meningkatkan akurasi perencanaan anggaran, memperketat monitoring pelaksanaan program, serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam eksekusi anggaran," ujar Lilik. Dalam bidang ekonomi, Fraksi PKS mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 yang mencapai 5,33 persen. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya inklusif karena masih adanya kesenjangan antarwilayah, khususnya di kawasan Madura dan Tapal Kuda.

PKS meminta strategi pembangunan lebih difokuskan pada penguatan ekonomi rakyat seperti UMKM, pertanian, nelayan, dan sektor informal dengan pendekatan berbasis kewilayahan. Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti penurunan angka kemiskinan yang dinilai masih melambat. Fraksi PKS meminta pemerintah menggeser pola penanganan kemiskinan dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan ekonomi produktif yang berkelanjutan.

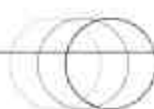
"Program perlindungan sosial harus mampu mendorong masyarakat lebih mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan," jelasnya. Di bidang ketenagakerjaan, FPKS menilai penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) belum diikuti peningkatan kualitas pekerjaan. Sebanyak 62 persen tenaga kerja masih berada di sektor informal dengan perlindungan minim dan upah rendah.

Fraksi PKS pun mendorong penguatan kebijakan link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri, serta perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Meski menyampaikan banyak catatan kritis, Fraksi PKS tetap mengapresiasi berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk penghargaan Provinsi Terinovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2025.

Namun, Fraksi mengingatkan bahwa penghargaan bukan tujuan akhir pemerintahan. "Prestasi dan penghargaan harus berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Jawa Timur," tegas Lilik. Di akhir pandangannya, Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan.



## Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (5/5/2026). Pendapat akhir fraksi ini dibacakan oleh juru bicara FPKS, Agus Cahyono. Dalam penyampaiannya, FPKS mengapresiasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim yang telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD.

Menurut Agus, evaluasi ini menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan BUMD benar-benar dikelola secara profesional dan memberikan kontribusi optimal bagi daerah. "Evaluasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi harus menjadi instrumen korektif untuk mendorong perbaikan tata kelola dan kinerja BUMD agar lebih profesional dan berdampak nyata bagi peningkatan PAD serta layanan publik," ujar pria yang kerap dipanggil Agus Cah itu.

### **FPKS Soroti Kinerja BUMD Jatim, Agus Cah: Jangan Jadi Beban Fiskal Daerah**



Namun demikian, FPKS menilai kinerja BUMD di Jawa Timur masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Salah satunya adalah ketimpangan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana hanya segelintir BUMD yang menjadi penopang utama, sementara yang lain belum menunjukkan kinerja optimal. Selain itu, FPKS juga menyoroti rendahnya produktivitas aset daerah yang disertakan sebagai modal (inbreng), lemahnya tata kelola perusahaan, serta masih adanya indikasi intervensi non-ekonomis dalam pengelolaan BUMD.

"Masih banyak aset BUMD yang idle, tidak produktif, bahkan tidak memiliki kejelasan legalitas. Ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam manajemen aset dan tata kelola," tegasnya. Agus juga menyoroti belum adanya grand design atau peta jalan pengelolaan BUMD yang terintegrasi. Akibatnya, arah bisnis BUMD dinilai tidak fokus dan berpotensi tumpang tindih antar-entitas. Sebagai solusi, FPKS mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap BUMD, khususnya yang berkinerja lemah atau merugi. Langkah tersebut dapat berupa merger, likuidasi, maupun rasionalisasi anak perusahaan.

"Tanpa langkah tegas, BUMD yang tidak produktif justru akan terus menjadi beban fiskal daerah," kata Agus. Selain restrukturisasi, FPKS juga menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance (GCG) secara konsisten, dengan indikator kinerja yang berbasis outcome seperti profitabilitas dan kontribusi dividen. Tak kalah penting, reformasi sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian utama. FPKS mendorong proses rekrutmen manajemen BUMD dilakukan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik.

"Profesionalisme harus menjadi prinsip utama. Pengisian jabatan strategis tidak boleh didasarkan pada kedekatan, tetapi pada kompetensi," imbuhnya. Dalam jangka panjang, FPKS juga membuka peluang pembentukan BUMD baru di sektor strategis seperti pangan dan transportasi, dengan syarat memiliki model bisnis yang jelas dan prospektif. Di akhir penyampaian, FPKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi rekomendasi tersebut melalui fungsi pengawasan DPRD. "Kami berharap hasil Pansus ini tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten demi terwujudnya BUMD yang sehat, profesional, dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," pungkas Agus.

**"Tanpa langkah tegas, BUMD yang tidak produktif justru akan terus menjadi beban fiskal daerah."**

H. Agus Cahyono SHI, MHI.  
Wakil Ketua Komisi A DPRD  
Jatim, Anggota Fraksi PKS

## Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

**MAKLUMAT.id**  
Beranda Topik Kelas Opini Hikmah Saasik Tarkizi Video Lainnya\*

### Soroti Kinerja BUMD, Ini Rekomendasi Fraksi PKS DPRD Jatim

1 Mei 2026 · 247 Dilihat · 12 menit membaca

**Jawa Raya Fraksi PKS, Agus Cahyono.** FOTO: ZHR

**MAKLUMAT** - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal. Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah untuk melakukan restrukturisasi BUMD, meningkatkan

**ANTARA.JATIM** HOME NASIONAL KABAR JATIM LINTAS DAERAH

### DPRD Jatim ingatkan BUMD jangan jadi beban fiskal daerah

Selasa, 5 Mei 2026 14:00 WIB

Jawa Raya Fraksi PKS DPRD Jatim Agus Cahyono mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan kinerja BUMD yang dinilai belum optimal. Agus Cahyono mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan kinerja BUMD yang dinilai belum optimal.

Finance

### FPKS DPRD Jatim Dorong Langkah Tegas Restrukturisasi BUMD Tak Produktif

Eliaz Muhammad Hanif  
Selasa, 5 Mei 2026

Jawa Raya Fraksi PKS DPRD Jatim Agus Cahyono mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan kinerja BUMD yang dinilai belum optimal.

**DigitalJatim.com** News Portal

### BUMD Jatim Disorot, FPKS: Banyak Aset Idle hingga Minim Kontribusi PAD

14 Mei 2026 · 14:00 WIB

Jawa Raya Fraksi PKS DPRD Jatim Agus Cahyono mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan kinerja BUMD yang dinilai belum optimal.

**TRENDING:**

1. Dilaga Ter...  
2. Hoki Mela...  
3. HUT ke-2...  
4. Putri C...  
5. Hari Perba...

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati menyoroti ancaman narkoba dan penyimpangan sosial yang dinilai semakin meresahkan masyarakat saat menghadiri silaturahmi Pengurus DPW PKS Jawa Timur ke Direktorat Intelkam Polda Jawa Timur, Jumat (8/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Lilik menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif, partai politik, dan aparat kepolisian dalam menjaga kondusivitas Jawa Timur, khususnya menghadapi persoalan sosial yang mulai menasar generasi muda dan lingkungan pendidikan.

“Kami dari Fraksi PKS sebenarnya ingin sekali bisa bersilaturahmi ke Polda, karena ada banyak hal yang perlu kita sinergikan bersama. Ada dinamika di Jawa Timur yang cukup meresahkan dan perlu kolaborasi untuk menyelesaikannya,” ujar Lilik. Legislator PKS dari daerah pemilihan Surabaya itu mengaku menerima banyak keluhan masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba di lingkungan warga. “Perkembangan narkoba ini cukup meresahkan. Ketika kami turun ke masyarakat dan melakukan kunjungan ke berbagai wilayah, termasuk di Surabaya, persoalan ini sering disampaikan warga,” katanya. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius semua pihak mengingat Jawa Timur merupakan provinsi yang dikenal religius.




## **SILATURAHIM DI POLDA JATIM, KETUA FPKS JATIM LILIK HENDARWATI SOROTI ANCAMAN NARKOBA DAN PENYIMPANGAN SOSIAL**

"Kita tentu tidak ingin anak-anak kita terpapar hal-hal yang tidak baik," tegasnya. Selain persoalan narkoba, Lilik juga menyoroti fenomena penyimpangan sosial yang menurutnya mulai menyasar kalangan pelajar dan lingkungan pendidikan, seperti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Ia berharap ada penguatan regulasi dan pengawasan untuk melindungi generasi muda. "Kami ingin mendapatkan banyak masukan dan informasi agar bisa memperkuat langkah-langkah kebijakan, termasuk mungkin melalui regulasi daerah, untuk menjaga generasi muda dari berbagai penyimpangan sosial," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Lilik juga mengapresiasi kondisi politik Jawa Timur yang dinilai relatif kondusif. Ia berharap situasi tersebut dapat terus dijaga melalui komunikasi dan kolaborasi antareleman masyarakat. "Alhamdulillah situasi politik Jawa Timur sejauh ini cukup baik dan kondusif. Harapan kami tentu kondisi ini bisa terus dijaga bersama," katanya. Sementara itu, Ketua DPW PKS Jawa Timur, Bagus Prasetia Lelana menyampaikan bahwa silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak demi menjaga stabilitas daerah.

Menurut Bagus, partai politik memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial di tengah masyarakat. "Kami ingin terus bersinergi dengan seluruh elemen, termasuk kepolisian, untuk menjaga Jawa Timur tetap aman, nyaman, dan kondusif," ujarnya. Di sisi lain, Wakil Direktur Intelkam Polda Jatim, Heri Sulisty Nugroho menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut. Ia menilai komunikasi antara kepolisian dan partai politik penting untuk memperkuat stabilitas keamanan daerah. "Kami mengapresiasi kunjungan dari DPW PKS Jawa Timur. Sinergi seperti ini penting agar kondusivitas Jawa Timur tetap terjaga," katanya.



***"Kami ingin mendapatkan banyak masukan dan informasi agar bisa memperkuat langkah-langkah kebijakan, termasuk mungkin melalui regulasi daerah, untuk menjaga generasi muda dari berbagai penyimpangan sosial".***



Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan di Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menilai bahwa kualitas dan pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Menurut Puguh, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur menunjukkan capaian yang relatif baik, namun jika ditelaah lebih dalam, sektor pendidikan belum sepenuhnya merepresentasikan kualitas yang diharapkan. "Kalau kita lihat lebih detail, aspek pendidikan kita masih jauh dari ideal. Harapan lama sekolah di Jawa Timur sekitar 13 tahun, tetapi realitasnya masih sangat sedikit anak-anak yang benar-benar menempuh pendidikan hingga jenjang tinggi," ujar Sekretaris Fraksi PKS Jatim ini. Ia juga menyoroti rata-rata lama sekolah di Jawa Timur yang masih berada di angka sekitar 8 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang bahkan belum menuntaskan pendidikan dasar secara optimal. "Ini menjadi catatan serius. Artinya, pendidikan dasar sembilan tahun saja belum sepenuhnya tuntas di lapangan," tegasnya.

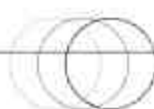
Puguh menilai, tantangan geografis dan disparitas kualitas pendidikan antar wilayah turut memperparah kondisi tersebut. Perbedaan kualitas antara daerah perkotaan dan wilayah pinggiran masih cukup lebar, sehingga berdampak pada ketimpangan akses pendidikan. "Di daerah pelosok, akses dan kualitas pendidikan sangat berbeda dengan di perkotaan. Ini yang harus menjadi fokus kebijakan pemerintah," katanya. Selain itu, ia menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri di tingkat SMA/SMK yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP. Kondisi ini membuat banyak siswa kesulitan melanjutkan pendidikan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke sekolah swasta, baik dari sisi biaya maupun kualitas. "Pemerintah harus hadir menjamin akses pendidikan, bukan hanya di sekolah negeri, tetapi juga memastikan sekolah swasta bisa diakses dengan mudah dan terjangkau," jelasnya.

Puguh juga mengapresiasi program beasiswa dari pemerintah pusat bagi masyarakat kurang mampu, namun ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat intervensi agar angka partisipasi pendidikan terus meningkat. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya fokus kebijakan pada penyelesaian masalah mendasar pendidikan, yakni kemudahan akses dari jenjang ke jenjang. "Harus dipastikan anak lulus SD bisa lanjut SMP, lulus SMP bisa lanjut SMA, dan lulus SMA punya kesempatan ke perguruan tinggi. Itu yang harus jadi fokus utama," ujarnya. Pada momentum Hari Pendidikan Nasional ini, Puguh berharap menjadi titik kebangkitan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur, baik dari sisi akses, pemerataan, maupun mutu layanan. "Harapannya, pendidikan di Jawa Timur semakin mudah diakses, semakin berkualitas, dan mampu melahirkan generasi yang berkarakter kuat serta berdaya saing global," pungkasnya.



**Hari Pendidikan Nasional 2026, Puguh DPRD Jatim Soroti Kualitas dan Akses Pendidikan**

## Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Surabaya, Lilik Hendarwati menerima aspirasi warga RW VI Kedungbaruk, Rungkut, terkait keberadaan tempat hiburan malam Casbar Bangkok Crab Surabaya yang dinilai menimbulkan keresahan di lingkungan permukiman warga. Pertemuan yang digelar dengan menghadirkan sejumlah OPD terkait seperti DPMPTSP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, serta Satpol PP itu menjadi ruang dialog antara warga dan pemerintah untuk membahas persoalan perizinan, dampak lingkungan, hingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam forum tersebut, Lilik menegaskan dirinya hadir untuk mendengarkan aspirasi warga sekaligus meminta penjelasan dari OPD terkait mengenai legalitas dan kesesuaian operasional Casbar dengan aturan yang berlaku. "Ada kondisi keamanan yang terganggu atas adanya salah satu tempat usaha ini. Karena itu saya ingin seluruh OPD terkait bisa memberikan penjelasan, apakah keberadaan usaha ini memang sudah sesuai aturan atau ada hal-hal lain yang perlu diperjelas kepada masyarakat," ujar Lilik.

Ketua Fraksi PKS Jatim itu menjelaskan, persoalan Casbar sebelumnya juga telah dibahas di Komisi B DPRD Kota Surabaya. Saat itu, salah satu rekomendasinya adalah agar pihak pengelola melakukan sosialisasi kepada warga sekitar. Namun hingga kini, menurut warga, rekomendasi tersebut belum dijalankan. "Warga hadir menyampaikan keresahan dan unek-uneknya. Saya ingin semuanya dibawa dalam konteks aturan. Apakah izin yang dimiliki sudah sesuai, bagaimana ketentuan untuk usaha bar atau klub malam, dan apakah keberadaannya tidak menyalahi tata ruang maupun ketentuan lingkungan," katanya.

## **LILIK HENDARWATI TERIMA ASPIRASI WARGA KEDUNGBARUK SOAL CASBAR BANGKOK CRAB, SOROTI PERIZINAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**



Lilik juga mempertanyakan proses penerbitan izin usaha tersebut karena lokasinya dinilai berdekatan dengan kawasan permukiman warga dan tempat ibadah. "Kalau secara aturan ternyata tidak sesuai, ini tentu menjadi pertanyaan besar. Apalagi warga menyampaikan belum ada sosialisasi dan lokasinya dekat dengan perumahan," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Ketua RW VI Kedungbaruk, Maradi Budiono, menyampaikan berbagai keluhan warga sejak Casbar mulai beroperasi hampir satu tahun lalu.

Menurutnya, warga terdampak mengeluhkan dentuman musik keras hingga dini hari yang mengganggu waktu istirahat. "Kami menerima banyak keluhan warga karena suara musik sangat keras sampai dini hari. Bahkan ada rumah warga yang mengalami retak-retak saat pembangunan," ujar Budiono. Selain persoalan kebisingan, warga juga mengaku resah dengan aktivitas hiburan malam yang dinilai berdampak pada lingkungan sosial di sekitar permukiman.

Budiono mengatakan warga telah beberapa kali melayangkan surat keberatan ke pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, termasuk meminta penghentian operasional klub malam tersebut. Namun hingga kini aktivitas usaha disebut masih berjalan. Sementara itu, Kortimja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Jawa Timur, Yuswanto, menjelaskan bahwa Casbar telah memiliki izin restoran dan bar, tetapi belum mengantongi izin operasional sebagai klub malam. "Yang belum dimiliki adalah izin klub malamnya. Dalam berita acara sebelumnya juga sudah ditegaskan bahwa operasional klub malam tidak boleh dilakukan sebelum izin lengkap," jelas Yuswanto.

Ia menambahkan, salah satu syarat penting pengajuan izin usaha klub malam adalah adanya sosialisasi dan persetujuan dari warga sekitar, yang hingga kini disebut belum terpenuhi. Menurut Yuswanto, penindakan terhadap aktivitas yang mengganggu ketertiban umum menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya. Menanggapi hal itu, Lilik menyatakan akan berkoordinasi dengan DPRD Kota Surabaya dan pihak terkait agar persoalan tersebut segera mendapatkan kejelasan. "Kita ingin semuanya jelas dan sesuai aturan. Aspirasi warga harus didengar, dan pemerintah juga harus memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai ketentuan," pungkasnya.



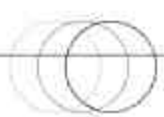
*Kita ingin semuanya jelas dan sesuai aturan. Aspirasi warga harus didengar, dan pemerintah juga harus memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai ketentuan.*

Hj. Lilik Hendarwati, S.Ak  
Anggota Komisi c DPRD Jatim,  
Ketua Fraksi PKS

# Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Resah Aktivitas Klub Malam, Warga Rungkut Surabaya Waduk ke DPRD Jatim



*sc RMOLJatim*

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas menyoroti polemik terkait kabar larangan guru non-ASN atau honorer mengajar mulai 1 Januari 2027 yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Menurut Puguh, isu tersebut memunculkan keresahan besar di kalangan tenaga pendidik honorer yang selama ini telah mengabdikan bertahun-tahun, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan guru ASN. "Surat edaran dan wacana terkait guru honorer ini memang menjadi salah satu situasi yang cukup polemik di tengah masyarakat, terutama bagi para guru yang sampai hari ini masih berstatus honorer," ujar Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu.

Ia menilai persoalan tersebut harus disikapi secara serius karena jumlah tenaga pengajar non-ASN di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, masih sangat besar dan selama ini menjadi garda terdepan dalam proses belajar mengajar. "Dunia pendidikan kita hari ini masih banyak ditopang oleh tenaga pengajar non-ASN. Mereka memiliki peran signifikan, terutama di daerah-daerah pinggiran dan wilayah yang kekurangan guru," katanya. Puguh mempertanyakan kepastian nasib para guru honorer jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan tanpa solusi yang jelas dari pemerintah pusat maupun daerah. "Kalau aturan itu diterapkan, lalu nasib mereka bagaimana? Apakah mereka dijamin akan diangkat menjadi ASN atau seperti apa skemanya? Ini yang harus dijawab secara jelas," tegasnya.

Legislator muda PKS itu juga menyoroti kondisi fiskal pemerintah daerah yang saat ini dinilai cukup berat akibat pemangkasan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut akan menyulitkan daerah jika harus menanggung beban pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN dalam jumlah besar. "Kita tahu hari ini kemampuan fiskal daerah sedang tidak menentu. Di sisi lain ada aturan belanja pegawai maksimal 30 persen, sementara banyak daerah belanja pegawainya masih di atas itu," ujarnya. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah benar-benar menyiapkan tata kelola aparatur pendidikan secara matang agar kebijakan tersebut tidak justru menimbulkan masalah baru dalam dunia pendidikan.

"Jangan sampai kebijakan ini menjadi kontraproduktif terhadap tata kelola pendidikan di Jawa Timur. Di satu sisi kita ingin melahirkan generasi berkualitas, tapi di sisi lain para pengajarnya justru tidak mendapatkan kepastian," katanya. Puguh menegaskan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia memiliki tantangan besar dalam sektor pendidikan, termasuk kebutuhan tenaga pengajar yang sangat tinggi. Ia meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur mulai menyiapkan langkah antisipatif dan solusi konkret jika nantinya aturan tersebut benar-benar diberlakukan. "Pemprov Jatim harus mencermati ini secara serius dan menyiapkan solusi yang relevan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan baik di seluruh wilayah Jawa Timur," pungkasnya.



## **PUGUH DPRD JATIM SOROTI POLEMIC LARANGAN GURU HONORER MENGAJAR MULAI 2027: PERAN MEREKA SIGNIFIKAN**

## Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)





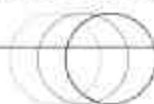
## Harisandi DPRD Jatim Dorong Madura Jadi Pusat Industri Garam Nasional

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari daerah pemilihan Madura, Raden Harisandi Savari mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk serius menjadikan Madura sebagai pusat industri garam nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurut Harisandi, potensi garam di Madura selama ini belum dikelola secara maksimal, padahal wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan produksi garam terbesar di Indonesia. "Hari ini Madura tidak cukup hanya dikenal sebagai penghasil garam. Kita harus naik kelas menjadi kawasan industri garam nasional yang modern, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar legislator PKS itu.

Ia menilai selama bertahun-tahun petani garam di Madura masih menghadapi berbagai persoalan klasik, mulai dari harga garam yang tidak stabil, minimnya gudang penyimpanan, lemahnya teknologi produksi, hingga masuknya garam impor yang kerap memukul harga garam rakyat. Karena itu, DPRD Jatim meminta pemerintah menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada petani garam lokal. Salah satunya melalui penguatan hilirisasi industri garam dengan membangun kawasan industri berbasis garam di Madura. Menurutnya, pengembangan industri tersebut bisa mencakup sektor garam konsumsi, farmasi, kosmetik, hingga kebutuhan industri nasional lainnya. "Jangan sampai Madura hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Garam Madura harus menjadi kekuatan ekonomi daerah dan sumber kesejahteraan masyarakat pesisir," tegasnya. Politikus muda asal Madura itu juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung untuk memperkuat ekosistem industri garam. Ia menyebut akses distribusi, gudang modern, teknologi pengolahan, hingga dukungan pembiayaan bagi petani garam dan UMKM turunan garam harus menjadi perhatian pemerintah. Menurut Harisandi, jika dikelola secara serius dan terintegrasi, sektor industri garam dapat menjadi instrumen strategis untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Madura yang hingga kini masih relatif tinggi dibanding beberapa daerah lain di Jawa Timur. "Ketika industri garam tumbuh, maka akan lahir lapangan kerja baru, usaha baru, dan perputaran ekonomi masyarakat pesisir.

Ini bukan sekadar soal garam, tetapi soal masa depan ekonomi Madura," katanya. Ia berharap Pemprov Jatim memasukkan pengembangan industri garam Madura sebagai salah satu program prioritas daerah. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, dan sektor swasta dinilai penting agar Madura benar-benar mampu menjadi poros industri garam Indonesia. "Potensi besar ini jangan sampai terus terabaikan. Madura punya kekuatan alam dan sumber daya masyarakat yang luar biasa untuk menjadi pusat industri garam nasional," pungkasnya.



## Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

**SUDUTKOTA.JID** Wednesday, June 24, 2026

Home Berita Terkini Daerah Pendidikan Nasional Internasional Hukum Kriminal Politik Pemerintahan

Harisandi Savari Dorong Madura Jadi Pusat Industri Garam Nasional

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah pemilihan Madura, Badri Haneandi Savari, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk serius menjadikan Madura sebagai pusat industri garam nasional yang terintegrasi dari

1. Perwujudan Kemandirian 122 MNU...  
2. Bupati Malang Minta Pemrisma E...  
3. Banih Hilari Beri jalan Pribadi...  
4. Anggaran Rp100 triliun...  
5. Wapres Jati berikan konsep...  
6. Kredit riel kum dan Rp1,5 m...

BERITA KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN

BERITA.COM

Harisandi Savari Dorong Madura Jadi Pusat Industri Garam Nasional

KAMU

KAMU, KOTA

**BATIMES**

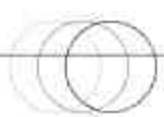
Harisandi DPRD Jatim: Madura Harus Naik Kelas Jadi Pusat Industri Garam Nasional Terintegrasi

Penulis: Muhammad Choniq Anwar - Editor: Nurhikmah Rani


30 May 2026 15:17

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dari Dapil Madura, R. Harisandi Savari.

JATIMTIMES - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dari Dapil Madura, R. Harisandi Savari, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk melakukan transformasi radikal di sektor perikanan.



## Harisandi Apresiasi Kolaborasi PWI dan Seniman Lokal di Pamekasan, Sebut Pelukis Penjaga Peradaban

A photograph showing four men seated at a long table covered with a patterned tablecloth. They are in a room with several framed artworks on the walls. The man in the center is speaking into a microphone. There are water bottles and cups on the table.

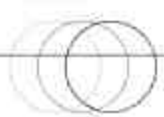
Anggota DPRD Jawa Timur, Raden Harisandi Savari mengapresiasi kolaborasi antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan dengan pelukis lokal dalam kegiatan Sarasehan Budaya dan Pameran Lukisan yang digelar di Hotel Odaita, Pamekasan, Sabtu (16/5/2026). Kegiatan yang menghadirkan ruang pertemuan antara insan pers dan pelaku seni itu dinilai menjadi langkah positif dalam menjaga sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat luas.

Menurut Harisandi, seni lukis memiliki peran penting dalam merawat identitas budaya dan merekam perjalanan sebuah peradaban. "Pelukis adalah penjaga peradaban dan kebudayaan. Lewat karyanya, mereka merekam realitas, menjaga nilai-nilai luhur, dan mewariskan identitas budaya kepada generasi mendatang," ujar Harisandi. Legislator Fraksi PKS asal Madura itu menilai karya seni bukan sekadar goresan warna di atas kanvas, tetapi juga bagian dari rekam jejak sejarah dan identitas suatu daerah.

Karena itu, ia memandang kegiatan pameran lukisan dan sarasehan budaya seperti ini penting untuk terus dihidupkan, terutama di tengah derasnya arus modernisasi dan perkembangan teknologi informasi. Harisandi juga menyoroti pentingnya sinergi antara wartawan dan seniman dalam membangun citra positif daerah. Menurutnya, wartawan melalui kekuatan narasi dan seniman melalui karya visual memiliki peran strategis dalam mengenalkan potensi daerah serta menjaga kearifan lokal. "Wartawan dan seniman punya peran besar dalam merawat kebudayaan. Jika disinergikan, keduanya bisa menjadi kekuatan untuk memperkenalkan potensi dan identitas daerah ke tingkat yang lebih luas," katanya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan dan mampu mendorong berbagai instansi maupun organisasi di Pamekasan untuk ikut memberikan ruang bagi para seniman lokal agar terus berkarya. "Budaya harus terus dijaga denyutnya. Seniman lokal perlu diberi ruang dan dukungan agar tetap produktif serta mampu menjadi bagian penting dalam menjaga identitas Madura," tuturnya. Kegiatan Sarasehan Budaya dan Pameran Lukisan tersebut menjadi ruang apresiasi bagi para pelukis lokal sekaligus ajang memperkuat kolaborasi antara dunia seni, media, dan masyarakat dalam melestarikan budaya daerah.

# Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menggelar simulasi tsunami di wilayah pesisir selatan, tepatnya di Trenggalek dan Lumajang, sebagai bagian dari uji kesiapsiagaan menghadapi potensi megathrust. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono. Agus, yang merupakan anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) 9 meliputi Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi, menilai langkah BPBD tersebut sebagai bagian penting dalam meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi potensi bencana. "Sebagaimana pernah disampaikan BMKG, jalur pantai selatan Jawa memang memiliki potensi sebagai sumber bencana, termasuk tsunami. Maka saya mengapresiasi OPD yang turun langsung ke masyarakat sebagai bentuk edukasi kesiapsiagaan," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim itu.

Namun demikian, Agus mengingatkan agar program edukasi kebencanaan dilakukan dengan pendekatan yang tepat, sehingga tidak justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. "Harapan saya, program kesiapsiagaan ini tidak menjadi hal yang menakutkan. Jangan sampai informasi potensi bencana justru menghantui masyarakat pesisir selatan," tegasnya. Menurutnya, fokus utama harus diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tanda-tanda alam dan langkah mitigasi yang perlu dilakukan saat terjadi kondisi darurat. "Yang penting masyarakat didedukasi untuk membaca gejala alam, memahami tanda-tanda bencana, dan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri ketika terjadi situasi darurat," jelasnya. Agus juga menekankan pentingnya melibatkan tokoh masyarakat dalam proses edukasi agar informasi yang disampaikan lebih efektif dan mudah diterima oleh warga.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar isu potensi bencana tidak terlalu sering diekspos secara berlebihan, mengingat kawasan pantai selatan juga merupakan destinasi wisata unggulan yang menopang perekonomian daerah. "Pantai selatan ini juga destinasi wisata yang menarik. Kalau terlalu sering dikaitkan dengan potensi bencana, bisa berdampak pada menurunnya minat wisatawan," katanya. Ia menambahkan, hingga saat ini wilayah seperti Trenggalek belum pernah mengalami bencana tsunami, dan diharapkan kondisi tersebut tetap terjaga ke depannya. "Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah terjadi tsunami di sana. Harapan kita tentu tidak akan terjadi, namun tetap harus siap dengan edukasi yang baik," pungkasnya. Agus berharap upaya mitigasi bencana di Jawa Timur dapat terus ditingkatkan dengan pendekatan yang bijak, sehingga masyarakat tetap waspada tanpa merasa terancam, serta tidak mengganggu sektor ekonomi seperti pariwisata.

A portrait of Agus Cahyono, a man wearing a black cap, a dark suit, a light blue shirt, and a blue patterned tie. He is looking slightly to the right of the frame.

## **SIMULASI TSUNAMI DI SELATAN JATIM, AGUS CAH DPRD JATIM: EDUKASI PENTING, JANGAN TIMBULKAN KETAKUTAN**



Kasus seorang guru olahraga berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jombang yang diberhentikan karena mangkir selama 177 hari kerja mendapat perhatian dari kalangan DPRD Jawa Timur. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait perlunya regulasi yang lebih ketat untuk meningkatkan disiplin ASN. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono menilai bahwa regulasi mengenai disiplin ASN sebenarnya sudah cukup ketat. Namun, menurutnya, persoalan utama justru terletak pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan integritas aparatur. "Kalau saya melihat, regulasi tentang ASN itu sebenarnya sudah ketat. Mulai dari absensi fingerprint, scan wajah, bahkan ada yang menggunakan rekam retina. Tetapi praktik pelanggaran disiplin masih saja terjadi," ujar legislator PKS itu.

Ia mencontohkan, masih ada oknum ASN yang hadir hanya untuk melakukan absensi pagi, kemudian meninggalkan tugas, lalu kembali saat sore hari untuk absen pulang. Karena itu, Agus menilai solusi utama bukan sekadar menambah aturan baru, melainkan memperkuat pembinaan dan integritas ASN. "Yang perlu dibenahi itu SDM-nya. Mulai dari pelatihan, penyadaran, pendidikan moral, hingga penguatan komitmen beragama dan budaya kerja. Ketika seseorang memiliki integritas, regulasi yang biasa saja sudah cukup membuat dia disiplin dan produktif," katanya. Anggota Fraksi PKS tersebut menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya berfokus membuat regulasi yang semakin ketat karena pada praktiknya setiap aturan tetap berpotensi dicari celahnya.

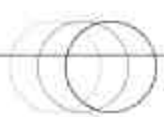
"Bukan sekadar bagaimana membuat aturan yang sangat ketat sehingga seolah-olah tidak ada celah. Karena semua regulasi bisa saja diakali. Yang paling penting adalah penguatan moralitas dan integritas ASN," tegasnya. Agus juga mendorong agar pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur memperkuat pola pembinaan aparatur melalui pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas dan karakter ASN. Menurutnya, keberadaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur yang selama ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas aparatur di daerah. "BPSDM Jawa Timur ini kan termasuk yang diapresiasi pemerintah pusat. Ini harus dimanfaatkan oleh kabupaten/kota untuk memperkuat pembinaan ASN, terutama dalam aspek moralitas, integritas, dan budaya kerja," ujarnya.

Meski demikian, Agus mengakui masih ada tantangan dari sisi anggaran di sejumlah daerah sehingga program pelatihan ASN belum berjalan maksimal. Ia berharap kasus di Jombang dapat menjadi pelajaran bersama bagi seluruh ASN di Jawa Timur agar semakin meningkatkan profesionalitas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan publik. "ASN adalah pelayan masyarakat. Karena itu, kedisiplinan dan integritas harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah," pungkasnya.

## **DPRD JATIM SOROTI KASUS ASN JOMBANG, AGUS CAH TEKANKAN PEMBINAAN INTEGRITAS**



# Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Khusnul Khuluk, memastikan stok hewan kurban di Jawa Timur menjelang Iduladha tahun ini dalam kondisi surplus. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator positif keberhasilan sektor peternakan di Jawa Timur. "Alhamdulillah, stok hewan kurban di Jawa Timur dipastikan surplus. Ini menunjukkan keberhasilan Dinas Peternakan Jawa Timur dalam mengembangkan sektor peternakan, baik sapi maupun domba," ujar Khusnul. Meski demikian, ia mengaku prihatin terhadap kondisi harga domba yang terus merosot dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, rendahnya harga jual sangat memberatkan para peternak kecil. "Kondisi harga domba sangat memprihatinkan.

Di daerah saya, domba 20 kilogram harganya sekitar Rp500 ribu. Bahkan anakan domba hanya dihargai Rp100 ribu sampai Rp150 ribu, hampir setara harga ayam jago," ungkapnya. Khusnul menilai situasi tersebut tidak sebanding dengan biaya dan kerja keras para peternak dalam memelihara ternak. Ia pun mendorong adanya terobosan kebijakan agar harga domba lebih stabil dan menguntungkan peternak. Berbeda dengan domba, ia menyebut harga sapi masih relatif stabil dan menguntungkan peternak. Sementara harga kambing juga dinilai masih cukup baik di pasaran. "Yang paling menggembirakan bagi peternak saat ini adalah sapi, karena harganya masih stabil dan cukup baik," katanya. Selain itu, Khusnul juga mengajak masyarakat Muslim di Jawa Timur yang memiliki kemampuan ekonomi untuk berkorban pada tahun ini.

Menurutnya, ibadah kurban tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat. "Berkurban bukan hanya menjalankan sunnah Rasulullah dan perintah Allah, tetapi juga membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus menggerakkan ekonomi peternak," ujarnya. Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih aktif membantu pemasaran hewan kurban ke luar daerah, terutama ke provinsi yang membutuhkan pasokan ternak. "Kami berharap ada peran aktif pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk mencari pasar di luar Jawa Timur, misalnya ke Kalimantan atau provinsi lain, sehingga hasil jerih payah peternak benar-benar bisa dinikmati," pungkasnya.



## STOK HEWAN KURBAN JATIM SURPLUS, KHUSNUL DPRD JATIM SOROTI ANJLOKNYA HARGA DOMBA



Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk mendorong pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di pasar hewan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurut Khusnul, kewaspadaan terhadap PMK perlu diperkuat karena penyakit yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, dan domba itu masih ditemukan di sejumlah wilayah di Jawa Timur. "Tentu kita sebagai kaum muslimin perlu waspada terhadap PMK, penyakit mulut dan kaki pada hewan berkaki empat ini, terutama kambing, domba, dan sapi," ujar Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKS itu.

Ia meminta dinas peternakan dan petugas kesehatan hewan mengoptimalkan pemantauan ke pasar-pasar hewan untuk memastikan kondisi ternak yang dijual dalam keadaan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. "Pemerintah harus sering mengoptimalkan kunjungan ke pasar-pasar hewan untuk memantau sejauh mana PMK ini masih ada di Jawa Timur. Karena sepengetahuan saya masih ada beberapa daerah yang terjangkit PMK," katanya. Khusnul bahkan menilai di beberapa wilayah kondisi PMK masih cukup mengkhawatirkan dibanding tahun sebelumnya sehingga diperlukan langkah antisipasi yang serius. "Kadang bahkan lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya," imbuhnya.

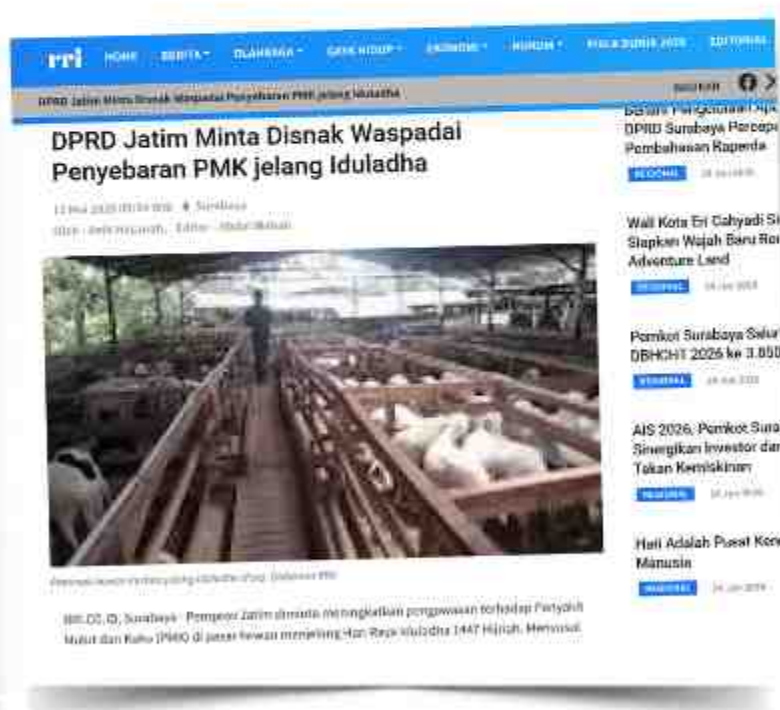
Selain pengawasan pemerintah, Khusnul juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti saat membeli hewan kurban. Menurutnya, calon pembeli perlu memahami ciri-ciri hewan yang terindikasi terkena PMK. Ia menjelaskan tanda-tanda yang perlu diwaspadai antara lain mulut hewan yang tampak bengkak, mengeluarkan air liur berlebihan, hingga adanya luka atau pembengkakan pada kaki. "Kalau mulut hewan kurban sudah agak bengkak, apalagi mengeluarkan air liur seperti sariawan, maka ini perlu dihindari. Begitu juga kalau di kaki ada bengkak atau luka," jelasnya. Khusnul menambahkan, petugas kesehatan hewan juga perlu rutin melakukan pemeriksaan di lokasi penyembelihan hewan kurban, baik di rumah pematangan hewan maupun di masjid dan lingkungan masyarakat.

"Biasanya petugas peternakan dan kesehatan hewan rutin menyambangi daerah-daerah yang banyak pelaksanaan penyembelihan kurban untuk memastikan hewan aman dikonsumsi," ujarnya. Ia menegaskan apabila ditemukan bagian hewan yang berpotensi membahayakan kesehatan, maka harus segera dipisahkan dan tidak dikonsumsi masyarakat. "Kalau memang membahayakan, ada beberapa bagian yang harus dibuang. Biasanya jeroannya disarankan tidak dikonsumsi oleh masyarakat," pungkasnya.



**Jelang Idul Adha,  
Khusnul Khuluk  
Dorong Pemerintah  
Intensif Pantau PMK  
di Pasar Hewan**

# Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)





Sab, 9 Mei 2026  
Festival Rujak Uleg



Min, 24 Mei 2026  
ELHA Fit Badminton



Kam, 28 Mei 2026  
Penyembelihan Qurban  
Joglo Harmoni



MUSWIL SPEED



Podcast



Min, 17 Mei 2026  
Senam-RW 2 Kalikedinding



Senam - RW 8 Kalikedinding



Sab, 2 Mei 2026  
Senam dengan Bestie



Sel, 26 Mei 2026  
Tamu Casbar



Sel, 26 Mei 2026  
Tamu Fraksi



# Galeri Foto Kegiatan



Bagi-bagi Al-Qur'an

Jember (Manggisan, Jatiroto, Pringgowirawan, Yosorati)  
25-26 Mei 2026



Sosialisasi Dewan (SOWAN)

Dapil 9  
Mei 2026  
Konstituen



**Sosialisasi Dewan (SOWAN)**

Dapil 9  
Mei 2026  
Konstituen



Kegiatan turba atau biasa di sebut kundapil untuk menyapa dan mendengarkann aspirasi dari masyarakat yg ada di dapil.

Mts Mambaul Ulum Karang Anom  
15 Mei 2026  
20 Orang

# FRAKSI PKS PROVINSI DPRD JAWA TIMUR



**PKS**



[www.fraksipksjatim.id](http://www.fraksipksjatim.id)



fraksipksjatim